BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan pedesaan adalah upaya pembangunan yang berfokus pada wilayah pedesaan dengan menekankan pentingnya kearifan lokal, yang meliputi struktur demografi penduduk, karakteristik sosial dan budaya, ciri fisik atau geografis, pola kegiatan pertanian, hubungan ekonomi antara desa dan kota, kelembagaan desa, serta karakteristik kawasan pemukiman (Hikmah Andini et al., 2015). Desa sebagai unit pemerintahan terkecil dalam sebuah negara, memiliki wilayah kekuasaan sendiri yang mampu mengelola sumber daya alam, manusia, serta keuangannya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya.

Pembangunan desa telah diatur dalam undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan mengelola berbagai potensi desa, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, objek wisata, kearifan lokal, dan potensi lainnya, desa dapat menjadi mandiri atau bahkan berkembang pesat (Anggraeni, 2016).

Kepemilikan desa atas aset yang dimiliki belum sejalan dengan upaya untuk menginventarisasi dan mencatatnya secara baik serta mudah diakses oleh publik. Meski demikian, pemanfaatan aset tersebut sudah dirasakan oleh pemerintah desa, baik oleh aparatur desa maupun masyarakat, melalui kontribusi

aset desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD). Desa yang memiliki aset telah mampu mengelolanya dengan baik, sehingga hasilnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) (Anshori, 2019). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir untuk mengelola potensi desa, dengan modal yang berasal dari kekayaan desa itu sendiri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 1, BUMDes merupakan badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan, dengan tujuan mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan tujuan pembangunan dan pendanaan yang berasal dari modal pemerintah daerah, simpanan masyarakat, serta dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, juga melalui pinjaman atau partisipasi modal dari pihak lain dengan sistem bagi hasil. Sebagai badan usaha yang beropresasi di wilayah desa, keberadaan BUMDes seharusnya tidak menjadi pesaing, apalagi merugikan usaha ekonomi milik warga desa. Dalam perannya sebagai lembaga sosial, BUMDes diharapkan mampu turut serta dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang ada di desa (Sinarwati & Prayudi, 2021). Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menambah pendapatan asli desa serta memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat desa. Pembentukan BUMDes bertujuan untuk menjalankan fungsi-fungsi desa serta mengelola unit usaha atau kegiatan produksi yang memiliki peran penting bagi desa (Werastuti et al., 2023).

BUMDes dibentuk sebagai unit usaha untuk menggali potensi dan kemampuan desa beserta warganya agar mampu memenuhi kebutuhan kolektif masyarakat secara keseluruhan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dasar hukum pembentukan BUMDes tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021. Saat pembentukan, pemerintah desa dan pimpinan memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi global, sehingga dapat dipahami oleh para penerima laporan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, di dalam sebuah komunitas atau perusahaan, penyusunan laporan yang dilaporkan harus dilakukan dengan baik dan benar serta mudah dipahami.

Salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki banyak BUMDes adalah Kabupaten Buleleng. Di setiap kecamatan di Buleleng, terdapat 148 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menjadikan Buleleng sebagai kabupaten yang kaya dengan BUMDes. Tujuan utama pembentukan BUMDes adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap desa. Namun, beberapa BUMDes di Kabupaten Buleleng menghadapi tantangan, termasuk mismanajemen dan dugaan penipuan. BUMDes di Kecamatan Kubutambahan mencatat jumlah kasus yang cukup tinggi, dengan lima BUMDes yang menghadapi permasalahan. Kelima BUMDes tersebut meliputi BUMDes Sari Nadi di Desa Tambakan, BUMDes Karya Sari di Desa Pakisan, BUMDes Praja Sidhi Yowana di Desa Kubutambahan, BUMDes Santhi Amerta di Desa Bukti, serta BUMDes Anugrah Amertha Bumi di Desa Mengening. BUMDes yang bermasalah adalah BUMDes yang didalamnya masih belum berhasil dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan ke BUMDes Anugrah Amertha Bumi yang berada di desa Mengening berfokus pada bisnis simpan pinjam, air bersih, dan pertokoan umum. Tiga tahun kebelakang ini BUMdes desa Mengening pernah mengalami risiko gagal bayar dari usaha simpan pinjam yang menyebabkan modal berkurang dan mengalami penurunan. Masalah lain yang dihadapi yaitu minimnya Sumber Daya Manusia yang bisa mengelola laporan keuangan yang menyebabkan risiko terjadinya kesalahan dalam pencatatan transaksi. Pada BUMDes Gunung Sari Mas di Desa Bulian diduga terjadi penyelewengan dana yang dilakukan oleh mantan pengurus. Berdasarkan hasil audit, diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 125 juta. Pihak desa telah melaksanakan musyawarah desa (musdes) sebanyak tiga kali. Namun, dalam tiga musdes tersebut, oknum yang diduga terlibat beserta pengurus lainnya justru mengundurkan diri tanpa memberikan pertanggungjawaban atau penjelasan apa pun.

Selanjutnya pada BUMDes Praja Sidhi Yowana yang memiliki aktivitas upaya simpan pinjam, toko ATK serta pengelolaan sampah yang menjadi upaya dasar operasionalnya. Masalah yang dihadapi oleh BUMDes saat ini adalah terjadinya kredit macet dalam usaha simpan pinjam, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan BUMDes. Kredit bermasalah, termasuk kredit macet, biasanya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses.

Di Desa Kubutambahan, BUMDes saat ini mengalami banyak debitur yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang pokok atau bunga melebihi tenggat waktu yang ditentukan, yakni lebih dari 180 hari. Kredit macet adalah

situasi yang mengkhawatirkan setiap lembaga ekonomi karena dapat mengganggu pengelolaan keuangan BUMDes dan bahkan berpotensi menghentikan kegiatan usaha BUMDes. Komang Hardi Atmaja selaku ketua BUMDes mengatakan bahwa usaha yang dijalankan pemasukannya tidak stabil dan anggaran modal yang diperoleh dari pemerintah tidak ada sehingga untuk mengembangkan usaha dalam meningkatkan pemasukan menjadi terhambat. Dan beliau mengatakan usaha yang dijalankan BUMDes desa Kubutambahan masih tergolong sedikit dan usahanya belum berkembang. Selain itu, BUMDes hanya memiliki laporan sederhana yang mencakup uang masuk dan keluar tanpa adanya anggaran yang jelas. Laporan BUMDes lengkap mencakup neraca, laporan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Kinerja organisasi di sektor publik baru dapat dievaluasi berdasarkan kemampuannya dalam mengelola anggaran. Setiap anggaran yang disusun oleh BUMDes sebaiknya dilaporkan melalui laporan keuangan yang telah ditetapkan dalam periode waktu tertentu (Sinarwati & Prayudi, 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan perhatian secara lebih insentif terhadap beberapa indikator yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan BUMDes. Kelemahan-kelemahan tersebut meningkatkan risiko kinerja keuangan menurun, terutama pada unit penjualan dan penyaluran kredit di BUMDes Kubutambahan.

Kasus-kasus kecurangan yang terjadi di BUMDes Kecamatan Kubutambahan menjadi indikator bahwa kinerja keuangan di BUMDes tersebut perlu ditingkatkan. Kecurangan dalam laporan keuangan merupakan bentuk tindak penipuan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang menyesatkan demi

keuntungan pihak tertentu. Akibat dari tindakan ini dapat merugikan banyak pihak secara signifikan dan memicu keraguan terhadap integritas akuntansi serta keandalan laporan keuangan (Masdiantini et al., 2022). Oleh karena itu, BUMDes perlu memiliki sistem pengelolaan keuangan yang baik untuk memastikan bahwa seluruh aliran dana dikelola dengan transparan dan faktual. Dengan sistem yang baik, risiko kecurangan dapat dicegah, dan kinerja keuangan BUMDes dapat meningkat. Kinerja keuangan yang buruk atau tidak terkontrol dapat membuka peluang terjadinya kecurangan. BUMDes yang menghadapi kesulitan keuangan atau masalah dalam pengelolaan sumber daya finansialnya menjadi target potensial bagi individu yang mencari kesempatan untuk melakukan kecurangan. Kinerja keuangan yang lemah juga bisa memicu tekanan di kalangan manajemen atau staf untuk mencari cara-cara ilegal dalam memperbaiki situasi keuangan (Lesmana & Parlina, 2021). Kinerja keuangan mengacu pada penilaian tentang bagaimana suatu organisasi mengelola dan menghasilkan dana, serta seberapa baik organisasi tersebut mencapai tujuan keuangan tertentu. Kinerja keuangan yang baik dapat membangun citra positif lembaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kinerja keuangan perusahaan menceriminkan hasil yang dicapai dalam aspek keuangan, mencakup pendapatan, total biaya operasional, struktur utang, aset, serta pengembalian dari investasi. Analisis terhadap kinerja keuangan tidak hanya terbatas pada satu periode tertentu, karena pihak-pihak yang berkepentingan juga memperhatikan perkembangan atau tren perubahan dalam kinerja keuangan, termasuk perubahan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan arus kas (Devi et al., 2020). Kinerja keuangan yang baik tak lepas pada

peranan beserta semua aspek lembaga. Salah satu terpenting adalah pengawas. Kurangnya pengawasan ini menjadi salah satu faktor adanya kecenderungan kecurangan pada akuntansi.

Kecurangan dalam akuntansi, atau dikenal sebagai fraud akuntansi, adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan menyajikan informasi yang tidak akurat. Ketika pengawasan internal dan eksternal tidak berjalan efektif pada BUMDes yang tidak aktif, hal ini membuka peluang bagi individu untuk melakukan kecurangan atau manipulasi laporan keuangan. Tanpa pengawasan yang ketat, anggota organisasi mungkin merasa mampu menghindari deteksi dan sanksi. Kurangnya pengawasan juga dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan keuangan. Jika pencatatan keuangan tidak diperiksa dan divalidasi dengan baik akan dapat menghasilkan laporan yang tidak akurat, yang pada akhirnya bisa memengaruhi pengambilan keputusan yang salah. Situasi ini disebut *ineffectve monitoring*. *Ineffective monitoring* adalah situasi di mana pengawasan atau pemantauan terhadap suatu aktivitas, program, atau sistem tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai harapan. Hal ini mengacu pada kegagalan dalam melakukan pengawasan yang memadai terhadap transaksi keuangan, praktik bisnis, dan prosedur yang diterapkan. Pengawasan yang tidak efektif dapat menimbulkan berbagai masalah dan risiko, seperti meningkatnya peluang untuk terjadinya kecurangan, kesalahan, atau kebijakan yang tidak sesuai (Hendra & Nugroho, 2022).

Pengaruh *ineffective monitoring* terhadap kinerja keuangan khususnya pada pencegahan kecurangan dalam catatan finansialnya sudah dilaksanakan sebelumnya yakni kajian Kuntadi & Putri (2022) serta Dewi (2024) dengan

perolehan *ineffective monitoring* berdampak positif serta signifikan pada kinerja keuangan khususnya pada pencegahan kecurangan dalam catatan finansial. Di sisi lain, Utami dkk (2022) menemukan hasil yang berbeda, yaitu *ineffective monitoring* tidak memengaruhi secara signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Ketidakkonsistenan hasil yang diperoleh mendorong peneliti untuk meneliti kembali secara spesifik terkait pengaruh *ineffective monitoring* terhadap kinerja keuangan.

Ineffective monitoring memiliki dampak signifikan terhadap lemahnya pengendalian internal dalam suatu organisasi. Pengawasan yang tidak efektif dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan secara tepat waktu, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan. Ketika fungsi monitoring tidak berjalan optimal, prosedur pengendalian internal, seperti pemisahan tugas, otorisasi transaksi, serta dokumentasi yang akurat, menjadi rentan terhadap pelanggaran. Akibatnya, potensi kerugian finansial dan operasional meningkat, yang pada akhirnya dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, monitoring yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa pengendalian internal berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mampu mencegah serta mendeteksi potensi masalah.

Terjadinya *fraud* juga dapat dikendalikan dengan penerapan sistem pengendalian internal. Kivaayatul Akhyaar (2022) mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel organisasi, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan atas keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas dan efisiensi

operasional. Organisasi membentuk sistem pengendalian internal untuk mengawasi dan mencegah terjadinya kecurangan. Penerapan pengendalian internal bertujuan mencapai sasaran pengendalian organisasi. Jika sistem pengendalian berjalan secara efektif, maka akan tercipta lingkungan yang terkontrol dan mampu mencegah terjadinya kecurangan. Kebijakan serta pengawasan dapat diterapkan secara konsisten, sehingga dapat mengurangi tingkat risiko yang mungkin muncul. Untuk mengurangi peluang atau kesempatan seseorang melakukan kecurangan, diperlukan pengendalian internal yang kuat (Adiputra & Puspita, 2023). Sujana et al. (2020) juga mengemukakan semakin kuat sistem pengendalian internal di pemerintahan desa, maka kecurangan dapat diminimalkan, dan sebaliknya. Selain itu, pengendalian internal memiliki peran penting dalam melindungi aset organisasi dalam bisnis atau institusi. Pelaksanaan pengendalian internal oleh seluruh anggota perusahaan dapat secara signifikan mengurangi potensi terjadinya kecurangan, asalkan langkah-langkah tersebut dirancang dengan baik. Sebaliknya, ada kemungkinan kecurangan lebih mudah terjadi pada perusahaan atau organisasi yang pengendalian internalnya tidak dijalankan dengan baik.

Penelitian Damanik (2019), hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian penelitian Syukur et al. (2022), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Demikian juga penelitian Pinontoan et al. (2023) yang menyatakan bahwa pengendalian internal mempunyai pengaruh positif pada kinerja keuangan. Hasil sebaliknya yang diperoleh pada kajian Kivaayatul Akhyaar et al. (2022)

menunjukkan variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian sebelumnya dilakukan pada sektor pemerintah dan peneliti mencoba untuk melakukan penelitian serupa pada BUMDes untuk mengetahui lebih lanjut terkait keberpengaruhan sistem pengendalian internal khususnya pada BUMDes.

Faktor lain yang memicu kecurangan adalah budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki peran penting dalam mencegah atau memicu terjadinya kecurangan kinerja keuangan. Organisasi dengan budaya yang kuat akan mempengaruhi perilaku dan efektifitas kinerja karyawan yang akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi mampu meningkatkan kinerja keuangan pada BUMDes dan penerapan budaya dalam suatu perusahaan juga akan membentuk karakter karyawan dengan sendirinya dalam menjalankan tugasnya dan mencapai tujuan dari perusahaan. Budaya yang kuat dan positif, yang menekankan integritas, transparansi, serta akuntabilitas, akan membentuk perilaku etis di antara karyawan dan manajemen. Sebaliknya, jika budaya organisasi lebih condong pada pencapaian target tanpa memperhatikan cara atau prosesnya, hal ini dapat mendorong individu untuk melakukan kecurangan, seperti manipulasi laporan keuangan atau pencatatan yang tidak akurat. Tekanan untuk mencapai hasil yang tinggi, tanpa adanya pengawasan atau sistem kontrol yang memadai, akan meningkatkan risiko penyimpangan. Oleh karena itu, budaya organisasi yang sehat harus menanamkan nilai-nilai etika yang kuat serta mendukung lingkungan yang terbuka dan berorientasi pada kepatuhan terhadap standar keuangan yang berlaku. Penelitian ini menetapkan budaya organisasi sebagai variabel independent, karena budaya

organisasi memiliki dampak signifikan terhadap perilaku anggotanya dalam menerapkan strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja keuangan BUMDes. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Masni & Sari (2023) menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif pada kinerja keuangan.

Penelitian ini mencoba menggali dan menganalisis hubungan antar variabel-variabel utama yang diyakini memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Fenomena yang mendasari penelitian ini adalah tingginya jumlah kasus kecurangan yang melibatkan BUMDes. Variabel *ineffetive monitoring* diasumsikan bahwa semakin rendah efektivitas pemantauan terhadap aktivitas dan transaksi di BUMDes, maka kinerja keuangan BUMDes cenderung menurun. Minimnya pengawasan dapat membuka peluang bagi terjadinya praktik kecurangan dan penyalahgunaan sumber daya. Kemudian dengan adanya kebijakan, prosedur, dan kontrol yang ketat, sistem pengendalian internal dapat mencegah terjadinya kecurangan sejak awal. Misalnya, dengan pemisahan tugas, pengawasan yang ketat, dan otorisasi transaksi yang memadai. Budaya yang mendukung transparansi dan akuntabilitas membuat tindakan kecurangan menjadi lebih sulit untuk dilakukan dan lebih mudah untuk dideteksi. Sistem pengawasan yang baik dan laporan keuangan yang transparan membantu mengurangi peluang untuk penyelewengan.

Penelitian ini pengembangan studi sebelumnya yakni kajian dari Dewi pada tahun 2024. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang berbeda, yaitu penggunaan variabel budaya organisasi sebagai elemen penting dalam analisisnya. Budaya organisasi hingga saat ini masih relatif jarang diteliti

dalam pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sebagian besar penelitian dengan menggunakan variabel budaya organisasi mengukur pengaruhnya pada kinerja karyawan dan diukur dengan metode kualitatif. Padahal, budaya organisasi memiliki potensi untuk memengaruhi kinerja keuangan melalui dampaknya pada produktivitas, loyalitas karyawan, dan efektivitas pengambilan keputusan. Kekurangan penelitian di area ini menunjukkan adanya peluang besar untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai, norma, dan praktik dalam suatu organisasi dapat berkontribusi terhadap hasil finansial yang lebih baik. Selain itu, lokasi penelitian saat ini berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu di BUMDes Kecamatan Kubutambahan, yang juga mengalami kasus kecurangan dalam pengelolaan keuangannya. Dengan menggabungkan variabel budaya organisasi dan berfokus pada BUMDes, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam dan relevan mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan entitas tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendukung pengembangan pengetahuan yang lebih optimal tentang cara meningkatkan keberlanjutan keuangan BUMDes dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

Dengan demikian, *reseacrh gap* dalam penelitian ini adalah *empirical gap*, di mana fokus pada BUMDes sebagai objek penelitian memberikan keunggulan tersendiri. Hal ini karena BUMDes memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi di tingkat desa. Peneliti berupaya untuk melengkapi kekurangan empiris dengan melakukan kajian lebih mendalam, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih spesifik terhadap pemahaman faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan BUMDes. BUMDes memiliki peran kunci dalam memulai

pengembangan ekonomi desa, namun penelitian empiris yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan BUMDes masih terbatas. Oleh karena itu, penting untuk mengisi kekosongan empiris ini dengan memahami secara lebih dalam bagaimana BUMDes dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di desa. Fokus pada BUMDes membawa penelitian ini ke dalam konteks lokal yang relevan, karena desa sering kali memiliki dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang khas. Dengan demikian, penelitian yang secara khusus meneliti kinerja keuangan BUMDes dapat memberikan pemahaman yang lebih rinci dan kontekstual mengenai bagaimana faktor-faktor tertentu memengaruhi keberlangsungan ekonomi di desa.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh *Ineffective Monitoring*, Sistem Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Keuangan BUMDes Kecamatan Kubutambahan".**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Kecamatan Kubutambahan merupakan salah satu yang memiliki jumlah BUMDes yang tinggi di Kabupaten Buleleng, yaitu terdapat 5 BUMDes yang mengalami isu dalam kinerja keuangan akibat keterbatasan modal.
2. Terdapat masalah dalam pengawasan (monitoring) yang tidak efektif terhadap aktivitas dan operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Kubutambahan. Hal ini menyebabkan kinerja keuangan yang buruk atau tidak terkontrol, sehingga membuka peluang terjadinya kecurangan.

3. Kecurangan yang terjadi akibat sistem pengendalian internal yang lemah dapat menyebabkan kredit macet, yang berdampak negatif terhadap kualitas kinerja keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
4. Budaya organisasi yang tidak mendorong evaluasi risiko secara berkala sering kali gagal mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan yang berdampak pada kinerja keuangan.
5. Terdapat perbedaan dalam hasil pengujian sebelumnya yang dilakukan, yang menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam hasil penelitian.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah penelitian pada pengujian pengaruh *ineffective monitoring*, sistem pengendalian internal, dan budaya organisasi terhadap kinerja Bumdes. Objek penelitian pada Bumdes di Kecamatan Kubutambahan.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan dilatar belakang serta pada bagian identifikasi masalah, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh *ineffective monitoring* pada kinerja keuangan BUMDes di Kecamatan Kubutambahan?
2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal pada kinerja keuangan BUMDes di Kecamatan Kubutambahan?
3. Bagaimana pengaruh budaya organisasi pada kinerja keuangan BUMDes di Kecamatan Kubutambahan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh *ineffective monitoring* pada kinerja keuangan BUMDes di Kecamatan Kubutambahan.
2. Mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pada kinerja keuangan BUMDes di Kecamatan Kubutambahan.
3. Mengetahui pengaruh budaya organisasi pada kinerja keuangan BUMDes di Kecamatan Kubutambahan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari temuan yang didapatkan penelitian ini dipanjatkan harapan mampu menyalurkan tambahan bahan pendukung teori beserta memperluas wawasan serta ilmu khususnya di bidang pendidikan diantaraya yakni.

1. Manfaat Teoritis

   Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori serta konsep-konsep yang dipelajari selama perkuliahan, dengan membandingkannya denga penerapan di dunia nyata. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang cara menyelesaikan masalah dan menghadapi tantangan dalam mencapai kinerja yang optimal di Bumdes.

2. Manfaat Praktis

   a) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan koleksi perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, serta memberikan wawasan kepada pembaca tentang pentingnya membuktikan adanya pemantauan yang tidak efektif, sistempengendalian internal, dan budaya organisasi terhadap kinerja keuangan.

b) Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Diharapkan, hasil dari pengujian ini dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi kepada Badan Usaha Milik Desa, terutama di Kecamatan Kubutambahan, mengenai pentingnya monitoring yang efektif, sistem pengendalian internal yang efektif, serta budaya organisasi dalam upaya menjaga kualitas kinerja keuangan.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan pelaksanaan riset ini dapat memberikan manfaat sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi mereka yang tertarik meneliti kualitas kinerja keuangan BUMDes.